

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 1987, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Kebijakan hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, “*Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.
- Fuad Usfa, A. 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang.
- Hadari Djanawi Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung.

- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Medan.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat*, Dalam: Muladi, 2005, Editor, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Jakarta.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kansil, CST. 1976, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Liza Agnesta Krisna, 2022, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, CV. Widina Media Utama, Yogyakarta.
- Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rizki, Nanda, D., dkk., *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Widina Media Utama, Yogyakarta.

Robert Cotterrell, 1984, *The Sociology of Law: An Introduction*, Butterworths, London.

Salmi, Akhilar, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Mayalahnya*, ELSAM Huma, Jakarta.

Sutan Zanti Arbi dan Wayan. Ardharma, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, yang merupakan terjemahan dari The Design of Social Policy tulisan Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, Jakarta.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Topo Santoso, 2025, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau (KUHP).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.